

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KOMITMEN CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI  
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS TAHUN 2011**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka pelaksanaan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN Economic Community-AEC) Tahun 2011 untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan perdagangan serta meningkatkan daya saing nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Perhubungan;
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Menteri Perindustrian;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Menteri Pertanian;
13. Menteri Kehutanan;
14. Menteri Kelautan dan Perikanan;
15. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Menteri Kesehatan;
17. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Menteri Pekerjaan Umum;
19. Menteri Pendidikan Nasional;
20. Menteri Lingkungan Hidup;
21. Menteri Pemuda dan Olah Raga;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
24. Kepala Badan Standarisasi Nasional;
25. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
26. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
27. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

Untuk:

**PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Instruksi Presiden ini.

**KEDUA** : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program yang meliputi:

1. Menuju Pasar Tunggal dan Basis Produksi, yang fokus kepada:
  - a. Peningkatan Daya Saing dan Pemanfaatan Komitmen AEC;
  - b. Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas;

- c. Komitmen AEC untuk Arus Jasa Secara Bebas;
  - d. Komitmen AEC untuk Arus Investasi Secara Bebas;
  - e. Komitmen AEC untuk Arus Modal yang lebih bebas;
  - f. Priority Integration Sectors; dan
  - g. Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan.
2. Menuju Wilayah Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi, yang fokus kepada:
    - a. Kebijakan Persaingan;
    - b. Hak atas Kekayaan Intelektual;
    - c. Pengembangan Infrastruktur;
    - d. Perpajakan; dan
    - e. Perdagangan secara elektronik (e-commerce).
  3. Menuju Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Seimbang, yang fokus kepada Pengembangan Sektor Usaha Kecil dan Menengah.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian melakukan koordinasi dengan:

1. Gubernur Bank Indonesia sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia; atau
2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2011

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**